

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Cahyani (2014) yang berjudul Sistem Pengendalian Intern Kas Di Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera Sleman menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal kas, Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera dapat menaikkan pendapatan dan biaya sebesar 14%, kenaikan SHU sebesar 15% peningkatan modal sendiri dengan peningkatan anggota, mengalokasikan investasi untuk pembukuan kantor cabang dan meningkatkan kesejahteraan pengurus, pengawas dan pengelolaan serta anggota.

Penelitian Siregar (2016) yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Dompot Dhuafa Waspada Sumut diperoleh informasi bahwa pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatannya tidak semua bukti pengeluaran dan penerimaan kas diotorisasi oleh manajer yang berwenang, serta tidak adanya rotasi jabatan.

Penelitian Diyana (2017) yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Asosiasi Batik Mukti Manunggal Kabupaten Sleman) menyimpulkan bahwa Asosiasi Batik Mukti Manunggal sudah menerapkan pengelolaan keuangan, dengan ranking penerapan indikator pengelolaan keuangan yang paling tinggi diterapkan adalah indikator pencatatan, penggunaan anggaran, pelaporan, dan yang paling rendah adalah pengendalian.

Penelitian Mada (2019) yang berjudul Kerajinan Perak Desa Celuk: Perspektif Pengelolaan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP menyimpulkan bahwa usaha kerajinan perak di Desa Celuk, Sukawati sudah menerapkan pengelolaan keuangan, dengan ranking penerapan indikator pengelolaan keuangan yang paling tinggi diterapkan adalah indikator pelaporan, pencatatan, penggunaan anggaran, dan yang paling rendah adalah pengendalian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Tujuan	Metode	Kajian	Hasil Penelitian
1	Cahyani, 2014	Untuk mengetahui pengendalian internal kas di Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera Sleman	Kualitatif	Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Dengan adanya sistem pengendalian internal kas, Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Sejahtera bisa menaikkan pendapatan dan biaya sebesar 14%, kenaikan SHU sebesar 15% peningkatan modal sendiri dengan peningkatan anggota, mengalokasikan investasi untuk pembukuan kantor cabang dan meningkatkan kesejahteraan pengurus, pengawas dan pengelolaan serta anggota.

2	Siregar, 2016	Untuk mengetahui pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Dompot Dhuafa Waspada Sumut	Kualitatif	Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatannya tidak semua bukti pengeluaran dan penerimaan kas diotorisasi oleh manajer yang berwenang, serta tidak adanya rotasi jabatan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh informasi bahwa proses pengendalian manajemen memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja keuangan.
3	Diyana, 2017	Mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan, mencakup penggunaan anggaran, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian yang diterapkan oleh UMKM Batik pada Asosiasi Batik Mukti Manunggal Kabupaten Sleman.	Kualitatif	Pengelolaan Keuangan	Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Asosiasi Batik Mukti Manunggal sudah menerapkan pengelolaan keuangan. Ranking penerapan indikator pengelolaan keuangan yang paling tinggi diterapkan adalah indikator pencatatan (86,67%),

					penggunaan anggaran (76%), pelaporan (65,56%), dan pengendalian (65%).
4	Mada, 2019	Mengetahui bagaimana pengaruh pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pengusaha kerajinan perak di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati.	Kualitatif	Pengelolaan Keuangan	Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa usaha kerajinan perak di Desa Celuk, Sukawati sudah menerapkan pengelolaan keuangan. Ranking penerapan indikator pengelolaan keuangan yang paling tinggi diterapkan adalah indikator pelaporan (85%), pencatatan (83%), penggunaan anggaran (81%), dan pengendalian (66%).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Badan Pusat Statistik, usaha mikro, kecil dan menengah dinilai berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Usaha kecil memiliki entitas tenaga kerja berjumlah 5-19 orang, sedangkan pada usaha menengah memiliki entitas tenaga kerja berjumlah 20-99 orang.

Sedangkan pengertian usaha mikro, kecil dan menengah menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri. Usaha kecil dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri. Usaha menengah dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2.2.2 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kieso (2016), laporan keuangan merupakan sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi mengenai keuangan terutama kepada pihak eksternal perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Tujuan laporan keuangan salah satunya adalah menyediakan informasi kinerja keuangan, posisi keuangan, serta laporan arus kas suatu organisasi bisnis yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh

siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. (SAK ETAP, 2009).

2.2.3 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Menurut SAK ETAP (2009), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik umumnya digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas atau organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, lembaga pemeringkat kredit, dan kreditur.

Penyajian laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dijelaskan sebagai berikut (SAK ETAP, 2009):

1. **Penyajian Wajar.** Dalam penyajian wajar ini laporan keuangan menyajikan kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas suatu entitas dengan wajar. Syarat penyajian wajar antara lain yaitu penyajian yang jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban.
2. **Kepatuhan Terhadap SAK ETAP.** Entitas yang laporan keuangannya mematuhi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.
3. **Kelangsungan Usaha.** Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha.

4. Frekuensi Pelaporan. Entitas diharuskan untuk menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimal satu tahun sekali.
5. Penyajian yang Konsisten. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali jika terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian yang bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.
6. Informasi Komparatif. Informasi laporan keuangan harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan).
7. Matrealitas dan Agregasi. Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang bukan material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sama atau sejenis.
8. Laporan Keuangan Lengkap. Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik meliputi:
 - a. Neraca
 - b. Laporan laba rugi
 - c. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan seluruh perubahan dalam investasi atau ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
 - d. Laporan arus kas

- e. Catatan atas laporan keuangan, umumnya berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.
9. Identifikasi Laporan Keuangan. Entitas atau organisasi bisnis harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut.

2.2.4 Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Suadi (2011), sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar orang lain tersebut mau mencapai tujuan organisasi bisnis melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien.

Aktivitas dari sistem pengendalian manajemen biasanya merencanakan apa yang akan dicapai oleh perusahaan, mengkoordinasikan kegiatan pada masing-masing bagian, mengkomunikasikan informasi yang ada, mengevaluasi informasi, memutuskan apa yang akan dilakukan, dan mempengaruhi orang dalam organisasi tersebut untuk mengerjakan sesuai dengan yang digariskan atau ditujukan (Halim, 2009).

Menurut Halim (2009), pengendalian manajemen dalam hal ini tidak berarti bahwa setiap tindakan atau kegiatan harus sama dengan rencana. Pada prosesnya bisa saja berubah karena perbedaan waktu antara rencana dan kegiatan.

2.2.5 Tujuan Pengendalian Manajemen

Tujuan pengendalian manajemen adalah menjamin bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi yang akan dituju. Jadi, apabila seorang manajer menemukan cara yang lebih baik dalam operasi sehari-harinya, pengendalian manajemen seharusnya tidak melarang manajer tersebut melakukan dengan cara yang menurut manajer tersebut benar (Halim, 2009).

2.2.6 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Mulyadi (2017) unsur pokok sistem pengendalian manajemen ada 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan utama perusahaan.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
3. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian manajemen yang sangat

penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.2.7 Komponen-Komponen Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Sujarweni (2015) sistem pengendalian manajemen memiliki 5 (lima) komponen utama sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian manajemen yang baik. Beberapa komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian manajemen adalah:
 - a. Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Dalam perusahaan harus selalu ditanamkan etika di mana jika etika itu dilanggar itu merupakan penyimpangan. Contoh: datang tepat waktu adalah suatu etika yang baik dan begitu sebaliknya.
 - b. Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen, artinya di sini bahwa manajemen akan menegakkan peraturan. Jika yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas.
 - c. Struktur Organisasi
 - 1) Metode pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam perusahaan harus jelas dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 2) Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia. Perusahaan dalam memilih karyawan harus selektif dan melalui

prosedur tes yang semestinya bukan nepotisme dan sejenisnya.

3) Pengaruh dari luar. Apabila lingkungan dalam perusahaan sudah baik, maka pengaruh dari luar yang buruk akan mudah bersamasama ditangkal dan pengaruh yang baik akan lebih mudah diterima.

2. Penaksiran Risiko. Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Ada tiga kelompok risiko yang dihadapi perusahaan, yaitu:

- a. Risiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang salah (misalnya: harusnya dikerjakan dengan komputer ternyata dikerjakan secara manual).
- b. Risiko finansial, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena uang hilang, dihambur-hamburkan, atau dicuri.
- c. Risiko informasi, yaitu menghasilkan informasi yang keliru atau tidak relevan, atau bahkan sistem informasinya tidak dapat dipercaya.

3. Aktivitas Pengendalian. Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* mengidentifikasi setidaknya-tidaknya ada lima hal yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu:

- a. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan, dengan cara membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari atasan. Contoh: untuk meminta pergantian peralatan kantor maka bagian

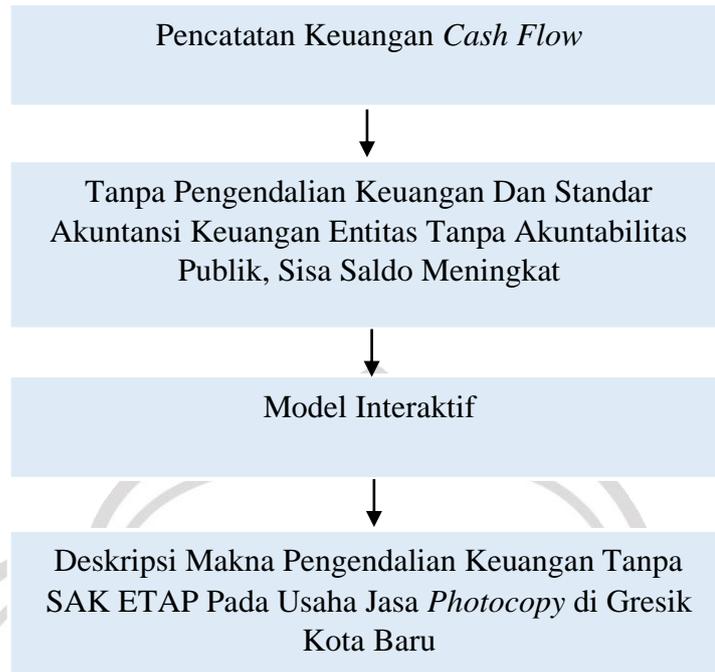
pembelian harus meminta persetujuan dari pimpinan dari bagian keuangan, persetujuan dari pimpinan keuangan itu dibuktikan dengan tanda tangan.

- b. Pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat perusahaan.
 - c. Rancangan penggunaan dokumen dan catatan yang baik, di mana dokumen sebaiknya mudah dipakai oleh karyawan, serta dokumen dibuat dengan bahan yang berkualitas agar bertahan lama jika disimpan.
 - d. Perlindungan yang cukup ketat terhadap kekayaan dan catatan perusahaan yang meliputi antara peccatat dan pembawa kas harus berbeda orangnya, tersedia tempat penyimpanan yang baik, dan embatasan akses ruang-ruang yang penting.
 - e. Pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan yang dapat dilakukan dengan salah satu langkah berikut:
 - 1) Membuat rekonsiliasi atau pencocokan antara catatan perusahaan dengan bank, maupun rekonsiliasi antara dua catatan yang terpisah mengenai suatu rekening.
 - 2) Melakukan *stock opname* yaitu mencocokkan jumlah unit persediaan di gudang dengan catatan persediaan.
 - 3) Menjumlah berbagai hitungan dengan cara *batch totals*, yaitu penjumlahan dari atas ke bawah.
4. Informasi dan Komunikasi, yang dalam hal ini merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hal-hal berikut ini.
- a. Bagaimana transaksi diawali.

- b. Bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap dimasukkan ke sistem komputer.
 - c. Bagaimana file data dibaca, diorganisasi, dan diperbaharui isinya.
 - d. Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan.
 - e. Bagaimana informasi yang baik dilakukan.
 - f. Bagaimana transaksi berhasil.
5. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera diambil tindakan. Berbagai bentuk pemantauan di dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu atau semua proses berikut ini:
- a. Supervisi yang efektif, yaitu manajemen yang lebih atas dapat mengawasi manajemen dan karyawan di bawahnya.
 - b. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu perusahaan menerapkan sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, departemen, dan proses yang dijalankan oleh perusahaan.
 - c. Audit internal yaitu pengauditan yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan.

2.3 Alur Pikir

Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru, berikut adalah gambaran alur pikirnya.



Gambar 2.1
Alur Pikir